



IPB Today

Volume 388 Tahun 2020

Menteri KKP RI: Pembangunan Maritim Indonesia harus Terintegrasi



Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan sampai saat ini belum mampu mengelola secara maksimal sumberdaya tersebut. Tidak hanya itu, sumber daya manusia di sektor maritim juga masih perlu dukungan sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Dr Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) mengungkapkan salah satu sumber pertumbuhan yang diharapkan dapat menghantarkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menjadi bangsa yang maju dan makmur adalah sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi negara maju perlu tatanan ekonomi yang maju. Tantangan paling mendasar adalah penggalan sumber ekonomi secara efisien dan berkesinambungan. Salah satunya adalah sumber daya pesisir dan pulau kecil. Dari webinar ini, kami berharap mendapat masukan dari para ahli yang sudah

hadir. Kami mohon para ahli bisa memberi masukan pada kami. Kami siap dikritik asalkan kami menemukan solusi untuk mewujudkan perikanan dan kelautan yang berdaulat demi mewujudkan Indonesia mandiri yang berlandaskan gotong royong,” tutur Edhy pada Webinar Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terdepan Sebagai Sabuk Ekonomi Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan, Kamis (18/6).

Untuk itu, lanjutnya, dalam pengelolaan wilayah pesisir harus mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, serta antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. Oleh karena itu, pengembangan potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu demi kepentingan ekonomi nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti **Pimpinan Redaksi:** Siti Nuryati **Redaktur Pelaksana:** Rio Fatahillah CP
Editor : Siti Zulaedah, Rosyid Amrulloh **Reporter :** Dedeh H, Awaluddin, Rizki Mahaputra **Fotografer:** Cecep AW, Bambang A, Rifqi Wahyudi **Layout :** Dimas R, M Rifki Ihsan **Alamat Redaksi:** Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga Telp. : (0251) 8425635, **Email:** humas@apps.ipb.ac.id



@ipbofficial



@ipbofficial



@ipbuniversity

LINE@ @ipbuniversity



www.ipb.ac.id

Sebagai salah satu upaya penanggulangan permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Menteri KKP RI tersebut menyebutkan diperlukan sebuah acuan pengelolaan dan pemanfaatan. Salah satu acuan yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beserta regulasi turunannya.

"Regulasi ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh provinsi di Indonesia melalui penyusunan dokumen perencanaan spasial Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)," jelas Edhy.

Webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (IAPWD) IPB University itu juga menghadirkan Prof Dr Rokhmin Dahuri selaku Ketua Tim Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Prof Dr La Ode M Kamaluddin selaku Penasehat Menteri KKP Bidang Ekonomi Maritim dan Prof Dr Hikmahanto Juwana selaku Penasehat Menteri KKP Bidang Hukum Internasional.

Dalam sambutannya, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengungkapkan ada lebih dari 200 desa di pesisir Indonesia yang masih rawan terkena pasang surut. Ia juga mengaku, kelautan dan perikanan sangat berpotensi dalam membangun ekonomi Indonesia. Sektor perikanan dan kelautan berpotensi besar sebagai new resources terlebih jika didukung dengan sustainability science.

"Pengembangan sektor perikanan dan kelautan juga perlu pendekatan teknologi yang terkini, memanfaatkan teknologi 4.0 dan juga menggunakan internet of things (IoT). IPB University memiliki sustainability tools, mulai dari sains, ekonomi, ekologi, hingga ilmu politik," terang Prof Arif.

Ia juga berharap para alumni IPB University yang tersebar di Indonesia dapat semakin giat dalam berkibrah, dan berkolaborasi sehingga dapat menciptakan inovasi serta berkontribusi bagi negara.

Sementara itu, Prof Rokhmin mengungkapkan bahwa ada banyak tantangan pembangunan di pulau-pulau kecil dan terdepan, di antaranya adalah kemiskinan sekaligus rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelolanya.

"Mewujudkan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau kecil terdepan perlu melibatkan banyak sektor," tegas Prof Rokhmin.

Ia menjelaskan, salah satu strategi yang bisa dilakukan yaitu menggandeng pihak investor dan pembangunan infrastruktur dasar kemaritiman. Tidak hanya itu, pembangunan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor utama, karena dengan hal itu pihak asing akan berpikir kembali apabila hendak melakukan illegal fishing atau penjahahan lain di Indonesia.

Prof Dr La Ode M Kamaluddin juga mengungkapkan strategi lain dalam membangun wilayah pesisir dan pulau kecil terdepan, yaitu dengan mengembangkan big data kelautan, mengoptimalkan sarana dan prasana, menciptakan kegiatan pariwisata pesisir dan laut, meningkatkan daya tahan rantai pasok dan meningkatkan akses kelancaran logistik serta perlunya pengembangan industri perikanan di kota pantai.

Pada kesempatan ini, Prof Dr Hikmahanto Juwana juga menyampaikan tentang pentingnya kehadiran di pulau-pulau terluar Indonesia. "Hal tersebut penting dan jangan hanya mengklaim di atas peta. Nanti Indonesia akan kehilangan pulau lagi seperti yang sebelumnya terjadi," ujarnya.

Adapun Dr Lukman Malanuang selaku Presidium IAPWD IPB University dan Penasehat Menteri KKP Bidang Kebijakan Publik menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Hal tersebut sangat memungkinkan jika wilayah pesisir dan pantai menjadi sumber kapital negara. "Jika Indonesia mau kaya tinggal ke laut saja, "pungkasnya. **(AMA/RA)**

Akses
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id

IPB University dan UI GreenMetric World University Rankings Komitmen Ciptakan Sustainability Leaders



IPB University dan UI GreenMetric World University Ranking mengadakan forum National Sustainability Leaders Meeting 2020 bertema Menciptakan Sustainability Leaders dalam Transformasi Kampus Berkelanjutan secara online, Rabu-Kamis (17-18/6). Forum tersebut diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Sedikitnya ada 137 Perguruan Tinggi (PT) yang terdiri dari 53 PT anggota UI GreenMetric dan 84 PT belum anggota UI GreenMetric.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan bahwa momentum pandemi COVID-19 patut dimanfaatkan oleh kampus untuk membentuk kelembagaan dan kepemimpinan kampus yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi, ia yakin sustainability bisa terwujud di setiap perguruan tinggi. Di kampus IPB University sendiri, kelembagaan green campus sudah terbentuk sejak sepuluh tahun lalu.

Sementara itu, Ketua UI GreenMetric (UIGM) Prof Dr Riri Fitri Sari berharap lebih banyak perguruan tinggi yang ikut serta di UI GreenMetric. Dia menjelaskan bahwa membangun jaringan untuk mewujudkan kampus hijau berkelanjutan sangat penting, terutama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ke 17 yaitu, Partnership for The Goal. "Kita semua dapat bekerjasama, berbagi pengalaman, dan saling menyemangati. Semoga perguruan tinggi di Indonesia dapat lebih baik lagi dengan

kampus yang didukung oleh kelembagaan pengelolaan operasi dan infrastruktur yang modern," ungkap Prof Riri.

Dalam webinar kali ini Prof Kitikorn Charmondusit, Ph.D dari Universitas Mahidol, Thailand menjadi pembicara kunci untuk mengurai pengalamannya membentuk kelembagaan kantor berkelanjutan dan kampus hijau di Universitas Mahidol. Berdasarkan pengalamannya, pemimpin perguruan tinggi harus dapat memberi contoh dalam berperilaku yang ramah lingkungan. Setelah itu, untuk mewujudkan kampus hijau, selain melibatkan semua unsur warga kampus, tentunya harus ada dukungan dana.

Turut hadir juga sebagai pembicara di hari pertama diantaranya Wakil Ketua UIGM, Junaidi, MA, Koordinator UIGM untuk Indonesia sekaligus Wakil Rektor Universitas Diponegoro, Prof Dr Ambariyanto, Kepala Lembaga Pengembangan Institut IPB University, Dr Ernani Rustiadi; Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof Mukri dan sebagai moderator Dr Aceng Hidayat, Sekretaris Institut (SI) IPB University yang juga Ketua Tim Implementasi Green Campus IPB University.

Di hari kedua, peserta memberikan pemaparan hasil workshop sustainability leader oleh tiga kelompok. Dari pemaparan tersebut disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan sustainability dan kelembagaan di perguruan tinggi berbeda-beda, semua peserta sepakat tentang pentingnya unit maupun kantor yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan menyusun strategi, kebijakan serta program keberlanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan di perguruan tinggi.

Sementara itu, di akhir sesi, Dr Aceng memberikan kesimpulan bahwa sustainability merupakan hal yang penting bagi setiap perguruan tinggi sebagai wadah untuk mewujudkan konsep kampus ramah lingkungan, yang jadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. "Rujukannya bisa dari pilar SDGs secara internasional dan nasionalnya bisa merujuk ke UI GreenMetric. Kelembagaan ini diperlukan baik organisasi maupun aturan mainnya sehingga memiliki arah dan kepastian yang sama. Adanya UI GreenMetric diharapkan bukan untuk persaingan, melainkan untuk saling belajar dan berusaha mewujudkan kampus yang berkelanjutan," tutupnya. **(RM/RA)**

Sekolah Vokasi IPB University Berikan Hibah Penelitian, Dorong Peneliti Berinovasi



Dalam webinar Metodologi Penelitian Hibah Sekolah Vokasi (SV) IPB University 2020, (17/6), Dekan SV, Dr Arief Darjanto mengatakan bahwa SV berusaha mendorong para dosen dan peneliti agar terus berinovasi dan menerbitkan hasil risetnya di jurnal ilmiah dengan memberikan insentif atau hibah penelitian. Dr Arief juga berharap agar nantinya artikel ilmiah yang diterbitkan dapat diterima di kancah internasional. Dengan kemudahan skema pembiayaan penelitian melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang baru dibentuk, diharapkan akan semakin mendorong akademisi IPB University untuk berkarya.

Dalam webinar tersebut beberapa pembicara dosen IPB University dihadirkan diantaranya Prof Dr Sumardjo, dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema) dan Dr Yeti Lis Purnamadewi, dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM). Para pembicara ini hadir untuk berbagi kiat-kiat demi menyukseskan persiapan proposal penelitian.

Prof Sumardjo menjelaskan bahwa luaran hasil riset perlu dijadikan orientasi sebagai penentu bobot dan kualitas penelitian yang akan dikerjakan. Penelitian yang menyinggung inovasi di bidang Sosial Humaniora (Soshum) dan dijadikan landasan perubahan kebijakan atau perubahan masyarakat khususnya di era normal baru, dinilai akan mendapat poin lebih sehingga memperlancar pendanaan.

“Latar belakang riset penelitian juga perlu berlandaskan pada masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat agar nantinya hasil riset akan berguna dan mudah untuk diterapkan di dunia nyata. Saya sarankan untuk membaca

dan mengeksplorasi jurnal-jurnal ilmiah terbaru yang dapat mendukung penyelesaian masalah sosial tersebut,” ujarnya.

Adapun tantangan riset di masa depan, menurut Prof Sumardjo adalah mengenaiantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, kondisi kesenjangan pemenuhan kebutuhan adaptif masyarakat dan perilaku stakeholder ilmu terkait, serta perilaku adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi di lingkungannya. Sehingga peneliti harus sering melakukan observasi dan menentukan metode penelitian yang tepat. Poin lain yang perlu diperhatikan adalah orisinalitas dan kemutakhiran riset atau singkatnya berkaitan dengan inovasi yang mungkin akan membuka pasar baru.

Di samping itu desain proposal penelitian juga merupakan hal yang krusial agar lolos pada tahap seleksi. Dr Yeti mengatakan bahwa kreativitas peneliti akan tercermin ke dalam proposal penelitian dan perlunya rancangan proposal penelitian tersebut akan menjadi dasar untuk menghasilkan data yang valid.

Desain penelitian sendiri dilakukan dengan cara melakukan desain perencanaan penelitian berdasarkan identifikasi masalah dan perencanaan pelaksanaan berdasarkan variabel yang diteliti. Poin penting selain bagan isi penelitian adalah penyesuaian metode, pengambilan judul serta latar belakang masalah. Semua poin tersebut harus mencakup informasi variabel yang telah ditentukan sebelumnya.

Masalah dalam penyusunan proposal penelitian juga sering dihadapi oleh peneliti, misalnya adanya gap fenomena yang terjadi pada saat observasi sehingga menimbulkan pertanyaan. Contohnya dana desa yang dikurcurkan pemerintah masih belum bisa menghantarkan rakyatnya kepada perekonomian yang lebih baik. Sehingga penelusuran terhadap penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti untuk menyusun kerangka pemikiran yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dengan kita me-review hasil studi sebelumnya, berarti juga kita sudah punya cara bagaimana mendapatkan masalah-masalah yang betul-betul aktual, yang belum dijawab oleh media sebelumnya,” tambahnya. **(MW/Zul)**

IPB University Peringkat 3 Nasional Terkait Pengabdian Masyarakat



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University menyelenggarakan Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama Fakultas dengan Mitra, (17-19/6). Terdapat beberapa cluster yang disajikan dalam seminar ini. Yakni cluster pangan, energi, sumberdaya alam dan lingkungan, ekonomi, teknologi dan rekayasa.

Dalam sambutannya, Dr Ernan Rustiadi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala LPPM menyampaikan bahwa IPB University berada di peringkat ketiga nasional terkait pengabdian masyarakat.

"Pemeringkatan pengabdian masyarakat sangat ditentukan oleh beberapa indikator. Secara umum indikatornya yaitu input, proses, impact dan khusus buat abdimas (pengabdian masyarakat) dalam beberapa tahun terakhir IPB University rankingnya belum terlalu menggembirakan. Dua tahun lalu kita rangking 50, tapi alhamdulillah tahun 2019 lalu ranking kita melejit naik ke peringkat 5," ujarnya.

Menurutnya, kemampuan recognisi menjadi penting. Kita terus berusaha meningkatkan recognisi kita. Karena itulah digelar seminar ini. Seminar penelitian sudah hampir 30 tahun terlaksana, akan tetapi penelitian kerjasama fakultas hanya berhenti sampai laporan pada mitra. Hanya beberapa yang sampai publikasi seminar dan lain-lain.

"Kita mendorong untuk mempublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat yang ada di LPPM atau tempat lain. Dari seminar abdimas, harapannya akan lahir output berupa prosiding dan sebagainya yang nantinya akan menjadi bukti kinerja, baik departemen, fakultas ataupun IPB University secara keseluruhan," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Prof Dr Sugeng Heri Suseno, Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat menjelaskan bahwa pengabdian masyarakat ialah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan iptek untuk memajukan masyarakat.

Menurutnya dana untuk pengabdian masyarakat jauh lebih besar dari penelitian. Namun demikian output yang dihasilkan masih sedikit, baik itu laporan, seminar, publikasi jurnal dan sebagainya.

"LPPM hadir sebagai insurance atau penjamin mutu. Luaran IPB University masih di bawah beberapa universitas lainnya. Sedangkan aktivitas pengabdiannya lumayan tinggi. Kerjasama kita ada sekitar 400, namun hanya 100 yang berfokus pada pengabdian masyarakat. Untuk itu menjadi penting untuk berupaya keras menggenjot kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat ini sekaligus menyajikan outputnya," ujarnya. **(IR/Zul)**

Kemitraan Kehutanan, Penyelamat Kebangkrutan Perusahaan



Hutan di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Hasil hutan dari hutan Indonesia tidak hanya berupa kayu, tetapi termasuk di dalamnya hasil hutan non kayu seperti madu, buah, getah, maupun produk non kayu lainnya. Dalam rangka melakukan pengkajian terhadap fungsi hutan, Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB University menggelar Pengajian Perhutanan Sosial dengan tema "Kemitraan Kehutanan Penyelamat Kebangkrutan Perusahaan: Pembelajaran Proses Penyelamatan PT Inhutani V, 16/6.

Sebagai narasumber utama, Direktur Utama PT Inhutani V (Persero) Periode 2012–2017, Dr Endro Siswoko menjelaskan perusahaan yang dipimpinnya itu memiliki wilayah dan area kerja yang mencakup lima provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung.

Beberapa wilayah kerja seperti Lampung memiliki luas wilayah 56.478 hektar sementara di Bangka mencapai 16.730 hektar. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang telah teregistrasi sehingga dapat dipantau secara berkala.

Dalam perjalanannya memimpin PT Inhutani V, banyak tantangan yang dihadapi oleh Endro. Tercatat pada tahun 2012 PT Inhutani V sempat mengalami beberapa permasalahan seperti perusahaan masih memiliki hutang pesangon kepada karyawan selama dua periode direksi, adanya cash flow bleeding, manajemen belum digaji

selama 2 tahun dan karyawan belum digaji selama 18 bulan. Tidak hanya itu, kawasan kerja PT Inhutani V juga sempat mengalami kebakaran sehingga luas area kerja menjadi berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya menerapkan lima strategi yaitu menyelamatkan areal kerja dengan bekerjasama dengan penggarap lahan, restrukturisasi organisasi dan sumberdaya manusia, optimalisasi aset, re-negoisasi kontrak kerjasama dan switching portofolio bisnis.

"Pada kerjasama dengan penggarap lahan itu, masyarakat kita berikan akses, bukan pemberian kavling, kami juga menyarankan supaya di sela-sela tanaman pangan itu supaya ditanam tanaman kehutanan. Di sini, masyarakat juga tidak diperbolehkan memperjualbelikan lahan," papar Endro.

Ia juga menerangkan, kunci keberhasilan resolusi konflik lahan adalah mengubah mindset perambah hutan menjadi petani hutan yang nantinya menjadi mitra kerja bagi perusahaan. Melalui upaya tersebut, saat ini sektor kehutanan dapat berkontribusi sebagai jaring pengaman pangan, lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar hutan. Acara yang dipandu oleh Dr Soni Trison, dosen IPB University dari Departemen Manajemen Hutan ini diikuti tak kurang dari 600 peserta. **(RA)**